DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

ABSTRAK iii

RINGKASAN DAN SUMMARY ..... iv-v

PRAKATA vi

DAFTAR ISI x

DAFTAR SINGKATAN xiii

DAFTAR DIAGRAM DAN TABEL xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 9
3. Kerangka Pemikiran 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 21

1. Negara dan Kewenangan Pemungutan Pajak: Dasar Pembenaran Teoretis dan Legitimasi 21
   1.1 Fungsi Pajak dalam Penyelenggaraan Negara 21
   1.2. Teori-Teori pembenaran Pemungutan Pajak 26
   1.3. Asas-asas dan Sistem Pemungutan Pajak 30
2. Penagihan Utang Pajak oleh Negara 36
   2.1. Penagihan Utang Pajak: Tindakan Hukum Pemerintahan 36
   2.2. Hak Mendahulu: Preferensi dalam Penagihan Utang Pajak 39
   2.3. Surat Paksa dalam Penagihan Pajak: Tindakan Yuridis Pemerintah 41

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 44

BAB IV METODE PENELITIAN 47

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN: PELAKSANAAN PUTUSAN EKSEKUTORIAL DAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP, URGENSI REFORMULASI BATASAN KEWENANGAN PENAGIHAN PAJAK 53

1. Penetapan keputusan Eksekutorial dan Kewenangan Penagihan Pajak Pembangunan 53
2. Implementasi KewenanganPemungutan dan penagihan Pajak 63
3. Tunggakan Pembayaran Pajak dan Realisasi Penagihan Utang Pajak 18
4. Urgensi Reformulasi Batasan Ruang Gerak dan Kewenangan Penagihan Pajak 85

BAB VI PENUTUP : KESIMPULAN DAN SARAN 120

6.1. Kesimpulan 121
6.2. Saran-saran 121